

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Penanggulangan Bencana Melalui Program Sekolah Madrasa Aman Bencana(SMAB) Sebagai Upaya Mitigasi Bencna di Kota Malang, Deri Fikri Haikal(2021).**

Upaya Mitigasi Bencana di Kota Malang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal yang ada di sekolah tersebut sangat berpengaruh dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan melalui tahap sosialisasi yang meliputi simulasi bencana, visualisasi materi SMAB, dan sosialisasi, warga sekolah baik staf pengajar maupun siswa mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Bertujuan untuk memberikan edukasi warga sekolah melalui program (SMAB), Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif.

##### **2.1.2 Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Fenny Irfany Muhammad, Yaya M AbdulAziz (2020).**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian terkait implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir Di Desa Dayeuhkolot masih terdapat beberapa permasalahan terlebih dalam aspek sumber daya seperti kurangnya pencegahan banjir, penanganan darurat bencana banjir, rehabilitasi dan rekontruksi. Pada hasil penelitian ini juga implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal dan masih terdapat permasalahan

dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Pada penelitian ini peneliti gunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kualitatif.

### **2.1.3 *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Penanggulangan Bencana Alam, Tulus Irpan Harsono Sitorus (2020).**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai alternatif sumber pembiayaan penanggulangan bencana alam juga menjelaskan bahwa peran CSR sangat membantu dalam upaya penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar dan bantuan yang diberikan oleh CSR dari suatu perusahaan untuk menopang pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di masyarakat. Penelitian ini bertujuan pada CSR sebagai bagian dari masyarakat yang melindungi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk mencegah bencana. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang peneliti tinjau maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program dalam mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mendadak atau insidental, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, terlebih bagi sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan sehingga perlu adanya kemampuan dan keahlian agar tujuan program bisa tercapai.

Berikut merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian
Deri Fikri Haikal, Tahun 2021	Penanggulangan Bencana Melalui Program Sekolah Madrasa Aman Bencana (SMAB)	Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan SMAB, melalui tahap sosialisasi yang meliputi simulasi bencana, visualisasi materi SMAB, dan sosialisasi, warga sekolah baik staf pengajar maupun siswa mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana.	bertujuan untuk memberikan edukasi warga sekolah melalui program (SMAB).	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif.
Fenny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, Tahun 2020	Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	Pada hasil penelitian ini implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal dan masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.	tujuan penelitian ini pencegahan bencana banjir, penanganan darurat bencana banjir, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir.	metodologi penelitian peneliti gunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kualitatif.
Tulus Irpan Harsono Sitorus, Tahun 2020	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Penanggulangan Bencana Alam.	Pada hasil penelitian ini melaksanakan bantuan public dalam bentuk seminar/ workshop/ sosialisasi/ promosi layanan public (baik lintas batas).	Penelitian ini bertujuan pada CSR sebagai bagian dari masyarakat yang melindungi atau bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk mencegah bencana	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.2 Teori yang Relevan

### 2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang selalu bersinggungan dengan lingkungan dan sosial masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *sustainable development*. CSR mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington yang mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Lebih lanjut Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang disebut *profit, planet dan people* (3P), dimana konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (*Initiative*, dalam Mernelly 2012).

Sejalan dengan hal tersebut, Ardianto dalam Pranoto dkk (2014) mengungkapkan bahwa CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut Widjaja & Yani (2006, dalam Mernelly 2012) mengungkapkan bahwa CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

*Corporate Social Responsibility* atau dapat disingkat sebagai CSR berdasarkan standar internasional ISO 26000 dalam Suharto (2020), adalah bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atas dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan yang dilakukan pada masyarakat dan lingkungan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pertimbangan harapan para pihak, sejalan dengan hukum yang berlaku; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Johnson dan Johnson dalam Hadi (2011), juga menyatakan hal serupa yang pada dasarnya mengatakan bahwa CSR berangkat dari asas filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan, baik secara separuh maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen sebuah perusahaan dalam bertindak secara etis dan bagaimanaperusahaan memiliki kontribusi peningkatan ekonomi dan sosial kepada para pihak-pihak yang terlibat dengan tidak lupa memperhatikan aspek lingkungan sekitar perusahaan dengan baik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.2.2 Prinsip Aktivitas Corporate Social Responsibility**

Cakupan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan memiliki dimensi yang cukup kompleks, selain itu CSR juga memiliki penafsiran yang sangat berbeda terutama jika dihubungkan dengan kepentingan para pihak yang berkaitan.

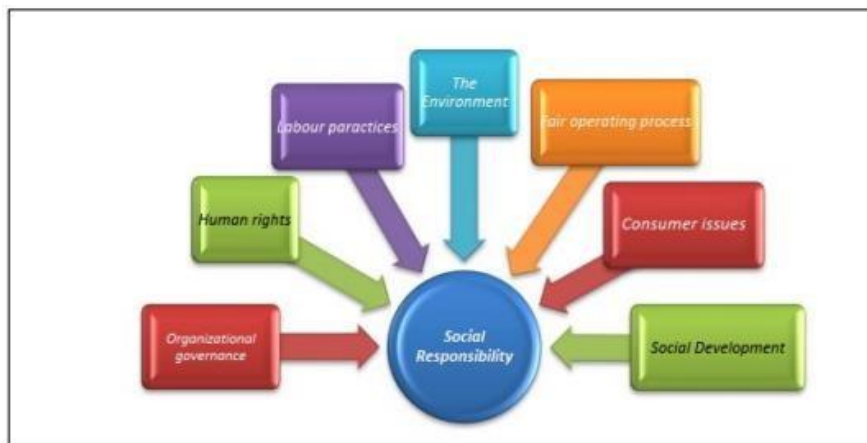
Maka dari itu, perlu adanya prinsip-prinsip yang mendasari proses pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Crowther David (2008) dalam Hadi (2011), membagi dan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan. Setidaknya ada tiga prinsip utama, yakni *Sustainability*, *Accountability*, dan *Transparency*. Penjelasan ketiga prinsip tersebut adalah:

1. *Sustainability* atau keberlanjutan, prinsip pertama ini dapat dilihat ketika bagaimana sebuah perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis mengedepankan aspek keberlanjutan sumber daya untuk masa depan.
2. *Accountability* atau akuntabilitas, menjelaskan tentang bagaimana sebuah perusahaan berupaya bertanggung jawab atas segala kegiatan yang telah dilakukan, dan prinsip ini berkaitan juga dengan bagaimana citra sebuah perusahaan.
3. *Transparency* atau transparansi, prinsip ini ingin mengatakan tentang betapa pentingnya bagi pihak diluar perusahaan untuk mengetahui informasi tentang proses bisnis perusahaan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, khususnya informasi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dari dampak dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketika membicarakan prinsip dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* tentu tidak melupakan standar internasional ISO 26000. Berdasarkan dokumen ISO 26000 setidaknya dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* mencakup tujuh aspek mulai dari kebijakan dan etika bisnis;

Kesejahteraan Karyawan; Dimensi Penerapan Pasar; Tanggung Jawab Kebijakan Fiskal; Akuntabilitas; Lingkungan; dan Pengembangan Masyarakat.



Gambar 2.1 Tujuh Aspek CSR ISO 26000  
Sumber : *Dokumen ISO 26000*

Berdasarkan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program lingkungan melalui program Bersatu Siaga Bencana (BEGANA) yang dilakukan oleh CSR PT Cikarang Listrindo Tbk sudah memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dilakukan dan aspek pada ISO 26000 yang dijalankan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk.

### **2.2.3 Urgensivitas Corporate Social Responsibility**

Dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* menjadi tolak ukur sebuah perusahaan dalam pelaksanaan proses bisnis perusahaan. Melihat kondisi ini setidaknya ada beberapa alasan terkait dengan pentingnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Wibisono (2007), menyatakan setidaknya 3 (tiga) alasan penting tentang kenapa banyak perusahaan mesti melakukan dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial yang sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, yaitu :

1. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dan oleh karenanya dirasa wajar apabila perusahaan juga mesti memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan pengusaha dan masyarakat seharusnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, wajar apabila perusahaan juga mesti berkontribusi aktif pada masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berpengaruh terhadap citra baik perusahaan.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Prioritas ini juga berkaitan dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan baik pada lingkungan dan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* saat ini bisa menjadi ukuran untuk menentukan apakah perusahaan itu baik atau tidak. Setidaknya ada beberapa argument yang menguatkan tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial ini yang dikemukakan oleh Robbins & Coulter(2011), yakni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Argumen Urgensi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

<b>Argumen yang Mendukung Pentingnya Tanggung Jawab Sosial</b>	
Ekspetasi Publik	Dengan melaksanakan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> mengarahkan opini public yang tidak hanyabertujuan pada profit namun juga aspek sosialnya.
Profit Jangka Panjang	Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung memiliki profit jangka panjang yang lebih pasti.
Citra Publik	Keterlibatan sebuah perusahaan dapat membantu dalam upaya pemecahan masalah sosial yang sulit dan biasanya berbelit.
Pelonggaran Peraturan Pemerintah	Dengan melaksanakan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara konsisten dan tepat sasaran diharapkan dapat berkurangnya peraturan pemerintah.
Penyeimbang Tanggung Jawab dan Kekuasaan	Dengan adanya <i>Corporate Social Responsibility</i> terjadi penyeimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam perusahaan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel 2. 4 Argumen Urgensi (Corporate Social Responsibility (Sambungan)

<b>Argumen yang Mendukung Pentingnya Tanggung Jawab Sosial</b>	
Keentingan Pemegang Saham	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> tentu akan meningkatkan harga saham dalam jangka panjang.
Pengusahaan Sumber Daya	Bisnis mempunyai sumber daya dalam mendukung proyek public dan proyek yang membutuhkan bantuan.
Pendekatan Pencegahan dari pada Perbaikan	Bisnis perusahaan yang semakin kompleks membuat perusahaan juga harus mengatasi masalah sosial lebih awal sebelum menjadi masalah lebih serius dan tentu lebih mahal untuk diperbaiki.

*Olahan Peneliti, 2024*

Berdasarkan dua penjelasan di atas mengenai pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya sebuah program tanggung jawab sosial tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan citra baik perusahaan, tetapi juga menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Keentingan perusahaan disini juga berkaitan erat dengan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial seperti menarik calon investor dan proses bisnis jangka panjang, mencegah risiko permasalahan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan *public* dan masyarakat pada proses bisnis Perusahaan.

#### **2.2.4 Implementasi**

Menurut Arinda Firdianti (2018:32) Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Dalam pandangan Mulyadi (2015:12), implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini ditunjukkan untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi pola operasional yang konkret, sekaligus berusaha mencapai perubahan, baik yang signifikan maupun yang lebih kecil, sesuai dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Secara esensial,

implementasi juga merupakan usaha untuk memahami hasil yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Purwanto dan Sulistyatuti (2012), implementasi mengacu pada kegiatan untuk mengirimkan hasil kebijakan (*policy output*) kepada kelompok sasaran (*target group*) oleh para pelaksana (*implementator*) sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, menurut Nurdin Usman (2002:70), implementasi dapat diartikan sebagai aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang terjadi dalam suatu sistem.

Menurut Kapioru (2014 : 105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Kondisi lingkungan (*environmental condition*)
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementator (*characteristic implementing agencies*).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa implementasi adalah langkah-langkah atau tindakan yang telah direncanakan secara matang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan.

### **2.2.5 Unsur-Unsur Implementasi**

Menurut Syukur (1986:396), proses implementasi memiliki tiga unsur penting sebagai berikut :

1. Adanya program atau kebijakan yang dijalankan.
2. Target group, merujuk pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, diharapkan mereka akan menerima perubahan atau manfaat yang dihasilkan dari program tersebut.
3. Unsur pelaksana (implementator), yang dapat berupa individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### **2.2.6 Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi merupakan realisasi dari perusahaan untuk selalu dekat dngan masyarakat. Implementasi pada tanggung jawab perusahaan adalah suatu pelaksanaan konsep yang menitikberatkan pada perhatian, jalinan dan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan, masyarakat maupun lingkungan (Hidayatullah, 2007; Julianda, 2013).

Menurut teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edward III berpendapat bahwa sukses atau kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola faktor-faktor tersebut. Lebih lanjut, Edward

III menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap proses implementasi.

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

George C. Edward III (1981) mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi pada pelaksanaan program. Dari faktor-faktor tersebut, komunikasi menempati posisi paling krusial dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi. Hal ini terkait dengan interaksi dan hubungan antara perumus kebijakan (pengambil keputusan) dengan pelaksana kebijakan, serta komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*). Untuk mencapai implementasi kebijakan yang sukses, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang materi kebijakan yang akan dijalankan, termasuk aspek-aspek teknis, latar belakang sejarah, dan filosofi dibalik kebijakan tersebut. Edwards III menyajikan tiga variabel indikator untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi dalam penerapan kebijakan. Ketiga indikator ini membantu memperhitungkan aspek-aspek penting dalam proses komunikasi guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sebagai berikut.

##### 1) Penyampaian (*transmission*)

Diharapkan kebijakan tidak hanya dikomunikasikan kepada para pelaksana atau implementator, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi komunikasi melibatkan unsur-unsur penting seperti komunikator (*communicator*), penerima (*receiver*), media (*transmitter-channel*), serta hambatan komunikasi (*noise*).

Komunikator memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pengambil keputusan kebijakan dan implementator kebijakan yang berada dalam beberapa tingkat birokrasi. Dalam pandangan Ibrahim (2003:17), komunikator harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga berhasil dalam proses komunikasi, termasuk keterampilan mempengaruhi orang lain, pemahaman mendalam tentang substansi kebijakan yang akan dikomunikasikan dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Penerima (receiver) adalah individu atau kelompok yang menerima pesan atau informasi kebijakan. Menurut Fligel (1984), penerima komunikasi dapat mengalami beberapa tahapan respon yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lamanya atau kebaruan pesan yang disampaikan, gaya komunikasi (apakah bersifat persuasif atau menarik), dan keputusan yang diambil oleh penerima terkait dengan mengimplementasikan, mengadopsi, atau mengonfirmasi pesan tersebut terlebih dahulu.

Media merupakan berbagai cara, metode, dan saluran komunikasi yang dapat digunakan baik secara lisan maupun tertulis, serta melibatkan pendekatan individual atau massa. Dengan semakin banyak variasi cara, metode, dan saluran yang digunakan dalam komunikasi kebijakan, asalkan dikombinasikan dengan baik dan disesuaikan dengan audiens yang tepat, penerima pesan kebijakan akan lebih memahami isi dari pesan tersebut (Ibrahim, dkk. 2003:18)

## 2) Kejelasan (*clrarity*)

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah bersifat jelas dan tanpa ambiguitas. Kepastian dalam komunikasi ini memastikan bahwa kebijakan yang telah disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak

berkepentingan dijelaskan dengan tegas mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, setiap pihak akan mengetahui persiapan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

### 3) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi dalam komunikasi saat mengimplementasikan kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persepsi atau pandangan, mengokohkan arah implementasi, dan memperkuat sikap para implementator terhadap kebijakan, sehingga mencapai kinerja kebijakan yang diharapkan. Konsistensi komunikasi ini mencakup kesinambungan, kesesuaian, dan keselarasan dalam informasi yang disampaikan, baik dalam konteks waktu maupun dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyampaian pesan. Dengan mengedepankan konsistensi komunikasi yang baik, para pelaksana dan penerima kebijakan akan memiliki pemahaman yang jelas dan terarah mengenai kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih efektif dan hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan lebih efisien.

## 2. Sumber daya

Edwards III (1980) menyatakan bahwa meskipun komunikasi berjalan lancar, keberhasilan implementasi kebijakan tetap bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dengan baik., yaitu:

- 1) Sumber daya manusia, merupakan elemen utama dalam proses implementasi. Staf yang terlibat harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang harus dilakukan. Selain itu, penting untuk memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki agar dapat menangani tugas dan pekerjaan dengan efisiensi.
- 2) Informasi, memiliki dua aspek dalam implementasi. Pertama, informasi terkait dengan cara melaksanakan program. Implementator harus mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui bahwa para pelaksana harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, umumnya bersifat formal dan bertujuan agar perintah dapat dijalankan. Wewenang atau otoritas memberikan legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Tanpa otoritas, implementator tidak memiliki kekuatan yang diakui oleh publik, sehingga dapat mengganggu proses implementasi.
- 4) Fasilitas, merupakan prasarana yang dimanfaatkan untuk mendukung operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan seperti gedung, lahan dan infrastruktur yang membantu dalam pelaksanaan tugas.

### 3. Perilaku Pelaksana Program

Menurut Edward III (1980), perilaku pelaksana program atau sikap merujuk pada kemampuan atau niat para pelaksana dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang melibatkan motivasi psikologis para pelaksana dalam menjalankan kegiatan

tersebut. Dalam konteks yang sama, Meter dan Horn juga menyatakan bahwa perilaku atau sikap pelaksana memiliki tiga aspek, yaitu:

- 1) Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana tentang kebijakan.
- 2) Arah respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan (dapat berupa penerimaan atau penolakan).
- 3) Intensitas dari respon tersebut.

Dengan demikian, disposisi atau sikap para pelaksana memiliki peran penting dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan dan dapat mempengaruhi tingkat motivasi dan keterlibatan mereka dalam menjalankan kegiatan terkait kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Pelaksana Program

Kebijakan yang kompleks memerlukan kolaborasi dari banyak individu. Jika struktur pelaksana program tidak mendukung implementasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas sumber daya dan menghambat kelancaran pelaksanaan program tersebut. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu memberikan dukungan yang sesuai untuk kebijakan yang telah diambil secara politik dengan melakukan koordinasi dan kerja sama yang efisien. Terdapat aspek yang mempengaruhi kinerja struktur organisasi, yaitu :

- 1) *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk standar minimum yang diperlukan.
- 2) Melaksanakan fragmentasi adalah proses penyebaran tanggung jawab kegiatan

atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja.

### **2.2.7 Tinjauan tentang Mitigasi Bencana**

Definisi bencana menurut Aminudin (2013) menjelaskan mitigasi dibagi menjadi dua yaitu mitigasi structural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi structural merupakan upaya yang berbentuk fisik untuk dapat mengurangi dampak dari ancaman bencana. Misalnya Pembangunan sarana dan prasarana yang mampu untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana. Sedangkan mitigasi *nonstructural* merupakan upaya yang berkaitan dengan penyadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga mampu untuk mengurangi dampak dari bencana.

Definisi dari bencana menurut Anies (2018:60) terbagi menjadi dua aspek yaitu mitigasi bencana structural dan mitigasi bencana non-struktural. Pada aspek mitigasi bencana structural lebih memberikan pencegahan terhadap Pembangunan fisik seperti Pembangunan tembok penahan, perbaikan drainase yang baik dan pemasangan rambu jalur evakuasi atau peringatan dini. Sedangkan mitigasi bencana non-struktural memberikan pencegahan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana seperti pendidikan dan pelatihan tentang mitigasi bencana banjir dan simulasi penyelamatan diri. Upaya pencegahan dilakukan agar dapat mengurangi atau meminimalisir risiko bencana seminimal mungkin.

Definisi mitigasi bencana menurut Joko, (2011:279). “Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.”

Mitigasi sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui Pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pengertian mitigasi menurut Giri, (2017:15) dalam buku tanggap darurat bencana alam. “Mitigasi bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda.” Dari pengertian ini, mitigasi bencana merupakan upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu bencana guna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut.

#### **2.2.8 Tinjauan tentang Bencana Banjir**

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang wajar atau alamiah. Apalagi fenomena ini yang biasa terjadi di suatu wilayah yang banyak dialiri oleh aliran air. Menurut Arif Kristanto (2010 :3) bencana Banjir adalah air yang melebihi kapasitas tampung di dalam tanah, saluran air, sungai, danau, atau laut karena kelebihan kapasitas air di dalam tanah, saluran air, sungai, danau, dan laut akan meluap dan mengalir cukup deras menggenangi daratan atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya.

Menurut Nurjanah dkk (2014:24) banjir adalah limpahan air yang melebihi tinggi permukaan air normal, sehingga melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir merupakan peristiwa yang terjadi karena luapan air ke area perumahan, jalanan, dan persawahan karena volume air yang berlebih sehingga media penampung air seperti saluran air, sungai, dan danau

tidak dapat menampung lagi. Terdapat beberapa jenis-jenis bencana banjir, faktor penyebab bencana banjir, dan dampak bencana banjir diantaranya yaitu :

#### 1. Jenis – jenis Bencana Banjir

Banjir merupakan jenis bencana hidrometeorologi. Banjir yang sering melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Menurut Kristianto (2010) bencana banjir dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

- 1) Banjir bandang, merupakan banjir di daerah permukaan rendah yang terjadi akibat hujan yang terus menerus dan muncul secara tiba-tiba.
- 2) Banjir sungai, umumnya terjadi akibat curah hujan yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara luas dan berlangsung cukup lama.
- 3) Banjir pantai, banjir yang terkait dengan terjadinya badai tropis atau disebut juga dengan angin puyuh laut atau taifun.

Sedangkan menurut Primus Supriyono (2014:16) ada beberapa jenis bencana banjir yaitu sebagai berikut :

- 1) Banjir hujan ekstrem, banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai akibat tingginya curah hujan di atas normal yang tidak mampu ditampung oleh daerah resapan air.
- 2) Banjir kiriman, banjir yang terjadi akibat meluapnya air sungai karena curah hujan yang tinggi di daerah lain.
- 3) Banjir bandang, banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan langsung hanya sesaat.
- 4) Banjir air laut, banjir yang disebabkan oleh angin puyuh laut atau angin topan dan gelombang pasang air laut.
- 5) Banjir lahar dingin, banjir yang diakibatkan oleh aktivitas letusan gunung

berapi yang mengeluarkan lahar dingin dari daerah puncak gunung.

- 6) Banjir lumpur, banjir yang disebabkan oleh meluapnya tumpukan lumpur yang berasal dari lahan sawah atau dari dasar sungai.

Berdasarkan jenis-jenis bencana banjir tersebut, dapat dilihat bahwa bencana banjir dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat yang berada di daerah rawan banjir. Maka dari itu bencana banjir harus di kelola dengan baik dan diwaspadai oleh seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar berubah menjadi suatu bencana yang besar dan serius.

## 2. Faktor Penyebab Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi jika curah hujan yang tinggi dan volume air di sungai meningkat, banyak masyarakat yang kehilangan harta benda bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu sebaiknya harus mengetahui dan memahami faktor penyebab bencana banjir, agar masyarakat mampu untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Menurut Kristianto (2010:5) faktor penyebab bencana banjir yaitu sebagai berikut :

### 1) Pengaruh aktivitas Manusia

- (1) Pembangunan dan perkembangan tempat pemukiman yang menyebabkan hilangnya lahan resapan air hujan.
- (2) Penggundulan hutan yang dilakukan di daerah pegunungan atau perbukitan untuk dijadikan daerah pemukiman atau pertanian menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah sehingga meningkatkan aliran tanah di permukaan.
- (3) Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk pemukiman dan industri.
- (4) Buruknya penanganan sampah yang menyebabkan air dari sungai dan saluran-

saluran meluap sehingga membanjiri daerah sekitarnya.

- 2) Kondisi alam yang bersifat tetap
  - (1) Kondisi geografis yang dipengaruhi oleh badai siklon atau angin muson.
  - (2) Kondisi topografi yang cekung, yang termasuk kedalam dataran banjir.
  - (3) Kondisi daerah sungai, seperti kemiringan dasar sungai yang datar, berkelokkelok, timbulnya sumbatan yang membentuk sebuah pulau (ambal sungai).
- 3) Peristiwa alam yang dinamis
  - (1) Hujan dalam jangka waktu yang Panjang atau hujan deras selama berharihari.
  - (2) Terjadinya perbendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.
  - (3) Penurunan muka tanah atau amblesan karena pengaliran air tanah terutama di lapisan artesis yang berlebihan.
  - (4) Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, bahwa faktor penyebab bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja. Akan tetapi juga oleh ulah manusia yang menyebabkan sebuah bencana banjir. Sehingga perlu adanya kesadaran dari dalam diri setiap manusia untuk selalu menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah ke aliran sunga, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuat bangunan dipingir sungai.

### 3. Dampak Bencana Banjir

Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian dan dampak di wilayah yang terkena

bencana banjir. Berikut dampak bencana banjir menurut Alghani (2011) dalam Primus Supriyono (2014:62) :

1) Dampak Primer

Bencana banjir yang terjadi dapat disebut sebagai dampak primer apabila bencana banjir menyebabkan kerusakan-kerusakan fisik yang mampu merusak berbagai jenis infrastruktur seperti jalan raya, bangunan rumah, bangunan perkantoran, pertokoan, jembatan, sistem drainase, kendaraan, dan berbagai fasilitas fisik lainnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai dampak primer.

2) Dampak sekunder

Selain menyebabkan kerusakan fisik, banjir juga dapat menyebabkan dampak sekunder yaitu banjir menyebabkan kegagalan panen sehingga persediaan pangan terganggu, terganggunya jalur transportasi sehingga sulit untuk mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan, cadangan air minum tercemar oleh limbah sehingga persediaan air bersih menjadi terbatas, kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat menyebabkan munculnya berbagai penyakit bawaan dari banjir, matinya berbagai jenis tanaman dan hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi banjir.

3) Dampak tersier

Dampak ini dapat dikatakan dengan dampak jangka panjang, karena bencana banjir mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi yaitu mengakibatkan kelangkaan barang-barang dan kenaikan harga. Selain dari bidang ekonomi, dalam sector pariwisata juga akan terganggu yaitu menurunnya minat wisatawan, biaya pembangunan kembali, dll.

### **2.2.9 Manajemen Risiko Bencana**

Manajemen risiko bencana menurut Nurjannah (2012:42) sebagai suatu proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen risiko bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual. Adapun tujuan manajemen risiko bencana secara umum adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban.
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi atau transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen risiko bencana dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) tahap dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari tahap

prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahapan – tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Prabencana

1) Pencegahan (*prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam.

2) Mitigasi Bencana (*mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan penyelenggaraan Pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- (1) Mengenali bahaya yang ada disekitar tempat tinggal kita.
- (2) Mengidentifikasi risiko berdasarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya bencana beserta intensitas atau dampaknya.
- (3) Menganalisis jenis ancaman yang ada.
- (4) Mengelola risiko dengan melakukan pencegahan, mitigasi dan memindahkan Sebagian atau risiko.
- (5) Menerima total atau pasrah menerima adanya bahaya akan tetapi masyarakat harus disiagakan.

(6) Setelah semua langkah tersebut dilalui setiap saat secara terus-menerus dilakukan pemantauan terhadap perkembangan ancaman dan perkembangan kerentanan masyarakat untuk mengantisipasi upaya peningkatan kemampuan yang diperlukan.

3) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
  - (2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.
  - (3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - (4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
  - (5) Penyiapan lokasi evakuasi.
  - (6) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana
  - (7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- 4) Peringatan Dini (Early Warning)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa

bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.

## 2. Tahap saat terjadi Bencana

### 1) Tanggap Darurat (*response*)

Tanggap darurat adalah serangkaian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

### 2) Bantuan Darurat (relief)

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

## 3. Tahapan Pasca Bencana

### 1) Pemulihan (recovery)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah sebagai berikut :

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
- (2) Perbaikan saran dan prasaran umum.
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

- (4) Pemulihan sosial psikologis.
  - (5) Pelayanan kesehatan.
  - (6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
  - (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengansasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasidilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan saranadan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dam resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

- 3) Rekontruksi (*reconstruction*)

Rekontruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana, prasarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnyakegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah

pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekontruksi terdiri atas program rekontruksi fisik dan program rekontruksi non fisik.

### **2.2.10 Relevansi Peran Pekerja Sosial Industri (PSI)**

Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik Pekerjaan Sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Dalam konteks ini, PSI menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi lain yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Suharto, 2006; dalam Suharto 2009).

Pekerja Sosial sebagai agen perubahan yang bertugas mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial memiliki peran-peran tersendiri dalam menjalankan praktiknya. Dalam dunia industri, pekerja sosial memiliki tugas serta peranan tersendiri. Bidang tugas Pekerja Sosial yang bekerja dalam dunia industry dijelaskan oleh Johnson (1984:263-264), sebagai berikut:

1. Kebijakan, perencanaan dan administrasi. Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan tidak melibatkan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial

dalam departemen-departemen perusahaan.

2. Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus. Tugas Pekerja Sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (*crisis intervention*), asesmen (penggalian) masalahmasalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alcohol dan obatobatan terlarangm pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat kerja, dan pemberian konseling bagi pensiunan atau pekerja yang menjelang pension.
3. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan Pekerja Sosial *industry* dalam perusahaan sangatlah luas cakupannya. Tidak hanya sekedar menangani dampak dari pemanfaatan teknologi saja, tapi berbagai aspek seperti dampak dari meningkatnya jumlah karyawan, peran Pekerja Sosial untuk menjawab isu pemberhentian karyawan dan pada saat perasaan tidak aman timbul pada pegawai (*declining mode*), dan juga pada saat terjadi *conflict of interest* pada karyawan seperti konflik karyawan dengan serikat kerja, dengan masyarakat lokal, dengan pemerintah, maupun dengan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan. Semua hal tersebut direalisasikan dalam bentuk pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial *industry*.

### 2.2.11 Pelayanan Pekerjaan Sosial Industri

Dalam menjalankan tiga bidang tugas dalam ranah industri, Pekerja Sosial dapat menggunakan dua pendekatan baik mikro maupun makro. Dalam pendekatan mikro, terdapat beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi individu dalam perusahaan, seperti dengan konseling dan terapi pada individu. Untuk pendekatan makro, pelayanan yang diberikan kepada kelompok melalui terapi kelompok, serta pelatihan dan pengembangan. Bentuk pelayanan dari pekerja sosial industri di perusahaan tidak hanya mencakup bagian internal perusahaan saja tapi juga mencakup bagian eksternal dari perusahaan, karena di masa sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan lingkungan dari suatu perusahaan sama dengan kesuksesan komersil.



Bagan 2.1. Pelayanan Sosial dan Eksternal Peksos Industri

Sumber : Suharto, 2009

Adapun tipologi model setting Pekerja Sosial Industri (Straussner, 1989:8-13, dalam Suharto, 2009:16) yang merupakan konseptualisasi tentang beragam pelayanan, juga peranan dan keterampilan yang dimiliki Pekerja Sosial Industri, diantaranya adalah:

1. Model pelayanan sosial bagi pegawai (*the employee service model*)
2. Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan (*the employer-work organization service model*)
3. Model pelayanan sosial bagi konsumen (*the consumer service model*)
4. Model tanggungjawab sosial perusahaan (*the corporate social responsibility model*) atau model investasi sosial perusahaan (*the corporate social investment*).
5. Model kebijakan *public* di bidang pekerjaan (*work related public policy model*).

Dari kelima model dalam tipologi di atas terlihat bahwa peran Pekerja Sosial industry di Indonesia harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani model-model pelayanan tersebut. Tentunya perlu dibekali keterampilan serta pengetahuan yang sesuai diawali dengan melakukan assesmen terhadap budaya yang ada dalam perusahaan agar nantinya memiliki gambaran intervensi seperti apa yang akan diberikan. Dan tentunya yang menjadi catatan penting adalah intervensi yang dilakukan harus secara holistik. Agar hasil dari intervensi menimbulkan perubahan yang maksimal dan berkelanjutan.

### **2.2.12 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Menurut Nuryana (2005) secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Di Indonesia, keberadaan sudah cukup populer. Terbukti dari telah banyaknya perusahaan yang menerapkan pendekatan CSR dan memiliki program CSR dalam perusahaannya.

Namun hubungan antara Pekerja Sosial Industri dengan CSR muncul karena yang terjadi pada masyarakat *industry* sehingga menimbulkan fenomena DEAF (*Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi*) yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006). Berikut ini adalah penjabarannya:

### 1. *Dehumanisasi* Industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Tindakan *merger* dan perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran. *Ekspansi* dan eksploitasi industri telah melahirkanketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

### 2. *Equalisasi* Hak-Hak Publik

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan, bukan saja dalam proses produksi, melainkan juga dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

### 3. *Aquariumisasi* Dunia Industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hokum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan *public*. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.

#### 4. *Feminisasi Dunia Kerja*

Semakin banyak wanita yang bekerja menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan juga terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

Penelitian *Public Interest Research and Advocay Center* (RIRAC) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial. Ditambah lagi dengan keberadaan perusahaan besar di Indonesia yang sudah peduli untuk melakukan CSR, seperti PT Pertamina, Coca Cola, Unilever, Nestle, serta Indocement dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga masyarakat serta lingkungan sekitar, jadi tidak hanya mencari kesuksesan ekonomi belaka, tapi juga keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan serta dalam memberdayakan masyarakat setempat sudah menjadi *indicator* dari keberhasilan perusahaan.

Seperti yang dikembangkan oleh Archie B. Carrol mengenai hal-hal yang membuat CSR perlu diterapkan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Konsep tersebut kemudian dinamakan konsep Piramida Tanggungjawab Sosial

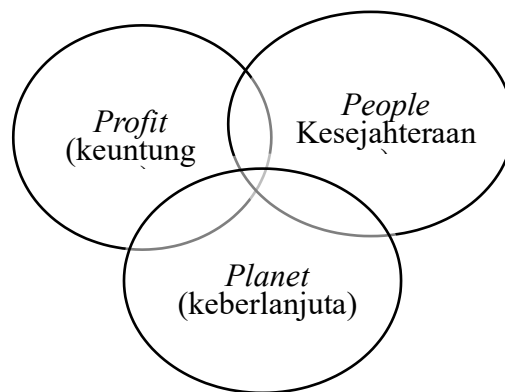
Perusahaan (Saidi dan Abidin, 2004; Suharto, 2009:102), yang berisi sebagai berikut:

1. Tanggungjawab ekonomis. Kata kunci: *make a profit*.
2. Tanggungjawab legal. Kata kunci: *obey the law*.
3. Tanggungjawab etis. Kata kunci: *be ethical*.
4. Tanggungjawab filantropis. *be a good citizen*.

Dengan tanggung jawab ekonomis sebagai bagian dasar dari piramida maka keuntungan atau *profit* perusahaan tetaplah menjadi hal utama karena hal tersebut merupakan modal utama suatu perusahaan dapat terus berjalan. Di bagian kedua berisi tentang kewajiban perusahaan untuk selalu taat pada hukum yang berlaku, dan menjalankan setiap program berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggungjawab etis perusahaan dalam setiap langkah kerjanya. Perusahaan bukan hanya harus taat pada hukum yang berlaku, tapi juga sesuai dengan nilai, norma dan etika yang ada. Yang terakhir, ditingkat teratas terdapat tanggungjawab *filantropis* dari perusahaan, yakni seputar kedermawanan perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan cara menyalurkan bantuan baik melalui *community development*, *sponsorship* dan program pemberi bantuan bagi masyarakat, maupun bantuan langsung pada korban bencana. Contoh salah satunya yang sedang peneliti ambil terkait tanggung jawab sosial dalam menghadapi ancaman bencana yang di laksanakan di Desa Labansari Kabupaten Bekasi.

Untuk lebih dapat memahami konsep piramida milik Archie B. Carol, adapula prinsip dasar CSR atau yang lebih dikenal dengan Triple Bottom Lines yang dikemukakan oleh Elkington, yang disebut 3P, seperti yang terlihat pada gambar di

atas, terdiri dari *profit*, *planet* dan *people*. Ketiga hal ini pada akhirnya menimbulkan kesadaran bagi perusahaan bahwa keuntungan dan keberhasilan perusahaan tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi keuntungan ekonominya saja, namun juga keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keberlangsungan alam.



Gambar 2.2 Triple Bottom Lines dalam *Corporate Social Responsibility*

Sumber : Suharto, 2009